

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LatarBelakang**

Berubahnya paradigma pembangunan dan pertumbuhan nasional saat ini yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi dari segi angka dan kenaikan output perkapita saja, menjadi pemerataan semua aspek pembangunan serta peningkatan taraf hidup bagi semua masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Turut menciptakan suatu kebijakan baru yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut undang-undang no. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan “Menurut Blakely dalam Kuncoro (2004) sebagaimana dijelaskan dalam Dewi, Nel dan Wijaya pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut”.

Dengan adanya pemberian otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat terutama dalam

masalah keuangan sehingga nantinya pemerintah daerah mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Sebagai daerah otonom, Kalimantan Barat dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain yang kesemuanya itu tergabung dalam pendapatan asli daerah (PAD). Berikut ini akan disajikan realisasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendapatan asli daerah di Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2000-2011 pada Tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat**  
**Periode Tahun 2000-2011**

No	Tahun	PAD (Dalam Juta)	Pertumbuhan (%)
1	2000	58.804,349	-
2	2001	108.241,867	84,07
3	2002	168.506,076	55,68
4	2003	198.409,942	17,75
5	2004	264.677,306	33,40
6	2005	295.462,266	11,63
7	2006	295.462,266	-
8	2007	471.327,210	59,52
9	2008	586.814,657	24,50
10	2009	579.575,650	(1,23)
11	2010	777.243,196	34,11
12	2011	1.080.456,052	39,01

**Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014**

Dari Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi pertumbuhan berdasarkan PAD di Kalimantan Barat berfluktuatif. Peningkatan yang paling banyak terjadi pada tahun 2007 sebesar 59.52% akan tetapi pada tahun berikutnya

mengalami peningkatan meskipun tidak besar dan pada Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1.23%. Di tahun-tahun berikutnya PAD mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Sumber keuangan daerah menjadi salah satu hal yang paling penting, karena keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri (Kaho, 1995 dalam Masyhuri, 2010). Namun yang terjadi sekarang ini adalah peran PAD dalam membiayai pembangunan daerah relatif sangat kecil. Padahal, bila merujuk pada prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akan semakin dialihkan ke daerah otonom yang bersangkutan. Oleh karena itu, PAD menjadi salah satu hal yang penting untuk ditingkatkan.

Fungsi PAD memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk pembiayaan pembangunannya. Untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, faktor ekonomi atau potensi ekonomi (SDA) yang dimiliki suatu daerah merupakan salah satu upaya yang sangat menentukan. Selain itu kondisi ekonomi yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi salah satu hal penting dalam rangka peningkatan PAD suatu daerah. PDRB secara tidak langsung dapat mendorong kenaikan PAD suatu daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dan dengan begitu kesejahteraan masyarakat tentunya dapat meningkat pula.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan hubungan antara PDRB dan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah, Santosa dan Rahayu (2005). Untuk mengetahui realisasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB di Kalimantan Barat periode 2000-2011, dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB di Kalimantan Barat**  
**Periode 2000-2011**

No	Tahun	PDRB (Dalam Juta)	Pertumbuhan (%)
1	2000	19,319,231	-
2	2001	19,838,486	2.69
3	2002	20,741,897	4.55
4	2003	21,455,285	3.44
5	2004	22,483,015	4.79
6	2005	23,450,355	4.30
7	2006	24,260,648	3.46
8	2007	26,260,648	8.24
9	2008	27,438,791	4.49
10	2009	28,754,360	4.79
11	2010	30,292,393	5.35
12	2011	32,100,656	5.97

**Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014**

Berdasarkan pada Tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB di Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2000 sampai 2011 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi

tertinggi pada tahun 2007 dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 26,260,648 miliar dengan laju pertumbuhan sebesar 8.24% dari tahun sebelumnya. Angka laju pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sempat mengalami penurunan pada tahun 2008. Kondisi ini dikarenakan krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap hampir semua sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Pada masa pasca krisis ekonomi terdapat gejolak perbaikan pada tahun 2009 dengan sedikit kenaikan dan berangsur naik pada tahun berikutnya.

Berdasarkan penjelasan dari dua tabel di atas, dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa penting untuk meningkatkan penerimaan PDRB, karena ini berdampak pada meningkatnya PAD di daerah tersebut begitu juga sebaliknya. Selain peningkatan pada kedua penerimaan tadi hal penting untuk mendukung terlaksananya kemandirian daerah, adalah dengan meningkatkan investasi di daerah tersebut. Pemerintah setempat perlu untuk menarik investor baik dalam daerah ataupun asing dan memberdayakan penduduk daerah tersebut agar ada harapan pembangunan daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut realisasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan investasi di provinsi Kalimantan Barat periode 2000-2011 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

**Tabel 1.3**

**Pertumbuhan Investasi di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2000-2011**

No	Tahun	PMDN		PMA	
		Investasi (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Investasi (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2000	3.395.910,48	-	1.600.518,90	-
2	2001	3.681.001,49	8,40	2.464.562,75	53,99
3	2002	3.871.001,49	5,16	2.953.134,66	19,82
4	2003	4.411.370,44	13,96	3.597.623,10	21,82
5	2004	4.437.964,81	0,60	3.891.641,51	8,17
6	2005	4.096.566,80	(7,69)	5.561.835,34	42,92
7	2006	4.256.212,61	3,90	5.626.316,30	1,16
8	2007	4.579.582,98	7,60	6.619.655,70	17,66
9	2008	5.201.254,75	13,57	7.600.348,25	14,81
10	2009	6.339.179,61	21,88	9.725.033,09	27,96
11	2010	8.381.741,96	32,22	10.014.922,42	2,98
12	2011	10.004.669,43	19,36	12.607.278,49	25,88

**Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014**

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi PMDN dan realisasi PMA yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2000-2011 cenderung mengalami peningkatan, meskipun terdapat periode tahun dimana investasi mengalami penurunan. Periode tahun 2005 merupakan periode dimana investasi terendah terjadi, penurunan tersebut terlihat pada investasi PMDN yang mengalami penurunan sebesar 7.69%. Pada tahun berikutnya investasi PMDN dan PMA mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Selain peningkatan PAD, PDRB, dan investasi, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah jumlah penduduk. Penduduk menjadi elemen penting yang

perlu dibahas karena penduduk juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, selain itu juga penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang terjadi adalah jumlah penduduk yang terlalu tinggi justru dianggap sebagai penghambat dari peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, padahal bila disertai dengan peningkatan kualitas SDM yang semakin baik, serta persebaran penduduk yang merata, seharusnya jumlah penduduk yang besar bukanlah masalah yang serius. Berikut ini adalah realiasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan penduduk di Kalimantan Barat periode tahun 2000-2011 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

**Tabel 1.4**  
**Pertumbuhan Penduduk di Kalimantan Barat Periode Tahun 2000-2011**

No	Tahun	Penduduk	Pertumbuhan (%)
1	2000	3,732,950	-
2	2001	3,844,059	2.98
3	2002	3,907,519	1.65
4	2003	3,947,691	1.03
5	2004	4,033,234	2.17
6	2005	4,098,461	1.62
7	2006	4,118,225	0.48
8	2007	4,178,498	1.46
9	2008	4,249,117	1.69
10	2009	4,319,142	1.65
11	2010	4,395,983	1.78
12	2011	4,477,348	1.85

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2014

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2000-2011 meningkat setiap tahunnya. Hal ini pun diikuti pula oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat kita lihat pada tabel diatas.

Dari Semua tabel yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari PDRB, dan investasi mengalami kondisi yang fluktuatif, berbeda dengan variabel jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana PAD, investasi, dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah investasi, PAD, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi, PAD dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Bagi Pemerintah : penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pembelajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat memberi kebijakan ataupun keputusan yang berguna demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- b) Bagi peneliti : diharapkan dengan penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh selama menjalani perkuliahan berupa penerapan teori-teori dan ilmu-ilmu untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan agar nantinya dapat menjadi bahan informasi yang berguna.
- c) Bagi masyarakat dan berbagai pihak : dapat dijadikan bahan informasi serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.